

DAFTAR PUSTAKA

- Apridasari. 2018. Paham Ketuhanan Positivisme Auguste Comte Dalam Perspektif Islam. *Skripsi*. Lampung
- Ardiansyah dan Fakhrudin. 2021. Analisis Implementasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pendekatan Teori Max Weber. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11: 104-113.
- BBC News Indonesia. 2014. *Akil Mochtar Divonis Hukuman Seumur Hidup*. Diakses tanggal 15 Oktober 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar
- Comte, A. 1830. Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. *Revue Encyclopédique*, 2, 385-398.
- Darmastuti, Rini. 2007. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Enceng. 2014. Administrasi Kepegawaian. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Fanhar, Frisca Tyara M. 2020. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Corruptio. Vol.01 Issue 2*: 82-83.
- Fikri, M. dan Supriono. 2009. Studi Filsafat August Comte. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Herabudin. 2015. Pengantar Sosiologi. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Amin. 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama.
- Indonesia. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat Negara .
- Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Lembaran Negara RI Tahun 2000. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia Corruption Watch. 2021. *OTT: Senjata Ampuh yang Ditakuti Koruptor*. Diakses tanggal 15 Oktober 2023, dari <https://www.icw.or.id/id/article/ott-senjata-ampuh-yang-ditakuti-koruptor>
- Iswahyudi, A., dkk. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). Malang: Universitas Brawijaya
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kemdikbud. 2016. *Etika*. Diakses tanggal 25 Oktober 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 1993. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum*. Jakarta: Kemenpan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2003. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta: Kemenpan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. *Sekilas KPK*. Diakses tanggal 15 Oktober 2023, dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>
- Korupsi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Laporan Tahunan KPK 2015; 2016; 2017; 2018*. Diakses tanggal 20 Maret 2024, dari <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan?page=1>
- Lembaga Survei Indonesia. 2021. *PERPUU UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik*. Diakses tanggal 20 Maret 2024, dari <https://www.lsi.or.id/post/manifest-abundance-in-your-life>.
- Mawarni, D.A. dan Zumratul, F. 2019. *Filsafat Positivisme Auguste Comte*. Universitas Darussalam Gontor.
- Muslim, M.H.P., dkk. 2022. *Filsafat Positivisme Dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Mengatasi Mal Administrasi Publik*. Universitas Negeri Padang.
- M.Z., Ismail. 2021. *Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Unizar Islam Al-Azhar Mataram.
- Nigro, Felix A. dkk. 2007. *The New Public Personnel Administration, Sixth Edition*. California: Thomson Wadsworth

- Nugroho, Irham. 2016. Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala*. Vol. Xi. No. 2.
- Nugroho, R. A. 2018. Tangkap tangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan*, 4(2), 117.
- Oktavianto, Rizky & Abheseka N.M.R. t.t. Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. Diakses 25 Oktober 2023, dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.
- Prabowo dan Darmawan, 2018. Operasi tangkap tangan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 365-384.
- Riyadi, A. 2020. Analisis Kinerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Dalam Penanggulangan Korupsi Dari Perspektif Teori Administrasi Publik, dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Administrasi Publik*, 6: 61-70.
- Sharma, RA. 1982. *Organizational Theory and Behaviour*. New Delhi: Mc Graw-Hill Publishing Company Limited.
- Simon, A. Herbert. 1997. *Administrative Behavior*. New York: The New Press.
- Sinambela, L.P., Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Steinberg, Sheldon S. dan Austern, D. T. 1990. *Government, Ethics, and Managers: A Guide to Solving Ethical Dilemmas in the Public Sector*. London: Bloomsbury Academic.
- Stoner, A.F. James. 1982, *Manajemen*, Second Edition, diterjemahkan Erlangga. Jakarta: Erlangga
- Surya. 2018. Analisis Operasi Tangkap Tangan KPK Dalam Perspektif Teori Administrasi Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 177-190.)
- Taulabi, Reskianto. t.t. *Positivisme Administrasi Publik*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Tempo. 2023. *Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ*. Diakses 15 Oktober 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1806495/tito-karnavian-sebut-pemerintah-tak-setuju-gubernur-jakarta-dipilih-presiden-dalam-ruu-dkj>
- Transparency International. 2018. *Corruption Perception Index*. Diakses tanggal 25 Oktober 2023, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2018>
- Weber, M. 1922. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. California: University of California Press.



- Widodo dan Waluyo. 2017. Tinjauan Positivisme Hukum Dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 3(1), 10-23.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.